

Perkembangan Pembelajaran Sejarah Pasca Kemerdekaan-Reformasi

Ulfah Nury Batubara, Aman

Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta

Email : ulfahnury@gmail.com, aman@uny.ac.id

Abstract: *This article aims to examine the development of historical learning from post-independence Indonesia to the Reformation period. During that period, Indonesia has made 9 (nine) curriculum changes. Learning history at the beginning of independence was characterized by a spirit of nationalism, considering that this time, Indonesia still had to struggle to maintain its independence. Entering the Suharto government, historical learning directions and policies also changed along with political interests, namely strengthening the legitimacy of Suharto's power. Furthermore, the Reformation period marked by the end of Suharto's rule, the direction and purpose of historical learning also changed, namely preparing the younger generation to have human resources that are equal to other countries. Learning of the history of the reform era made many changes and reviewed various past events that did not exist in the history books of the New Order. The research method used is descriptive method, which describes the problem to obtain answers. The results of the study show that learning from time to time changes color following the color of government politics. This is because history learning has a very strategic role in supporting government programs.*

Keywords: *Historical learning, the beginning of independence, Reformation*

Abstrak: Artikel ini bertujuan untuk mengkaji perkembangan pembelajaran sejarah mulai dari pasca kemerdekaan Indonesia hingga masa Reformasi. Selama periode itu, Indonesia sudah melakukan perubahan kurikulum sebanyak 9 (sembilan) kali. Pembelajaran sejarah di awal kemerdekaan diwarnai dengan semangat nasionalisme, mengingat masa ini, Indonesia masih harus berjuang mempertahankan kemerdekaannya. Memasuki pemerintahan Soeharto, arah dan kebijakan pembelajaran sejarah juga berubah seiring dengan kepentingan politik, yakni memperkuat legitimasi kekuasaan Soeharto. Selanjutnya masa Reformasi yang ditandai dengan berakhirnya kekuasaan Soeharto, arah dan tujuan pembelajaran sejarah ikut berubah, yakni menyiapkan generasi muda untuk memiliki SDM yang sejajar dengan negara lain. Pembelajaran sejarah era reformasi banyak melakukan perubahan dan mengkaji berbagai peristiwa masa lalu yang tidak ada pada buku-buku sejarah masa Orde Baru. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, yaitu menggambarkan masalah untuk memperoleh jawaban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran dari masa ke masa berubah warna mengikuti warna politik pemerintah. Hal ini disebabkan karena pembelajaran sejarah memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung program pemerintah.

Kata kunci: Pembelajaran sejarah, awal kemerdekaan, Reformasi

PENDAHULUAN

Setelah kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, perubahan-perubahan yang terjadi tidak hanya dalam bidang pemerintahan tetapi juga dalam bidang pendidikan. Perubahan yang terjadi dalam bidang pendidikan merupakan perubahan mendasar, yakni perubahan yang menyangkut penyesuaian kebijakan pendidikan dengan dasar dan cita-cita dari suatu bangsa yang merdeka. Cita-cita tersebut tertuang dalam landasan idiil, tujuan pendidikan, sistem persekolahan dan kesempatan belajar yang diberikan kepada seluruh rakyat Indonesia. Tidak terkecuali dengan pembelajaran sejarah, arah dan tujuan belajar sejarah berubah seiring dengan perubahan kebijakan pemerintahan.

Kajian-kajian mengenai kurikulum pembelajaran sejarah belum banyak di gali oleh para ahli akademisi. Salah satu akademisi yang menggali mengenai pembelajaran sejarah diantaranya Zulkarnain [1]. Dalam Disertasi beliau yang berjudul kebijakan kurikulum di sekolah menengah atas, banyak membahas perkembangan pembelajaran sejarah. Perbedaan yang mendasar antara Disertasi tersebut dengan artikel ini adalah perubahan kurikulum yang menekankan pada situasi politik pada zamannya. Artikel ini membahas pembelajaran sejarah sebagai motor penggerak politik pemerintahan, mulai dari tujuan, posisi hingga materi yang disesuaikan dengan ideologi pemerintah.

Kajian berikutnya oleh Suhartono [2] mengenai implikasi kebijakan pendidikan era Soeharto pada eksistensi Madrasah. Tulisan tersebut menyoroti kebijakan pemerintahan Soeharto pada Madrasah yakni dengan melakukan sentralisasi. Jika tulisan tersebut hanya membahas Madrasah dan dampak kebijakan sentralistiknya, maka tulisan ini

menyoroti perubahan pembelajaran sejarah sejak orde lama hingga Reformasi. Artikel ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi tema-tema pokok dan memperlihatkan perubahan-perubahan baik dari segi tujuan, landasan idiil, maupun materi dalam pembelajaran sejarah Indonesia. Pembahasan dibatasi pada pembelajaran sejarah sejak kemerdekaan hingga Reformasi. Pembatasan periode ini disebabkan karena sejak kemerdekaan, Indonesia baru memiliki kurikulum yang sesuai dengan sosial budayanya, tidak bersifat Eropa sentris, dan tidak menanamkan semangat feodal lagi. Pengetahuan kurikulum dan tujuan pembelajaran sejarah sangat berguna baik sebagai tinjauan akademis maupun untuk mengetahui arah kebijakan pendidikan Indonesia.

METODE

Metode penelitian adalah cara ilmiah yang dilakukan untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu [3]. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif, yaitu metode yang membicarakan beberapa kemungkinan untuk memecahkan masalah aktual dengan jalan mengumpulkan data, menyusun atau mengklasifikasinya, menganalisis, dan menginterpretasikannya. Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif karena penelitian ini mempunyai tujuan untuk memperoleh jawaban yang terkait dengan pendapat, tanggapan atau persepsi seseorang sehingga pembahasannya harus secara kualitatif atau menggunakan uraian kata-kata.

HASIL

Adapun hasil dari penelitian ini yakni tujuan dan landasan idiil pembelajaran sejarah tidak dapat dipisahkan dengan tujuan politik

pemerintahan. Hal ini disebabkan karena pembelajaran sejarah merupakan salah satu pembelajaran yang sangat strategis dalam melegalkan dan cukup efektif untuk mendukung program pemerintah. Oleh karena itu warna pembelajaran sejarah mengikuti warna politik pemerintahan. Masa Orde Lama, yang ditandai dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan, pembelajaran sejarah dituntut untuk bisa memberikan semangat motivasi bagi generasi muda, agar mau berjuang melawan penjajah.

Berbeda dengan Orde Lama, di bawah kepemimpinan Soeharto, Orde Baru menyadari bahwa penting untuk melakukan perubahan *mainset* generasi muda agar tidak terpengaruh terhadap ideologi pengajaran Manipol USDEK. Oleh karena itu, pembelajaran sejarah pada masa ini menjadi sangat penting untuk memperkuat legitimisasi kekuasaan dan menunjukkan keberhasilan orde baru. Warna pembelajaran sejarah berubah lagi, sejak Reformasi yang dimulai tahun 1999. Masa reformasi ditandai dengan runtuhnya kekuasaan Soeharto dan kroni-kroninya serta dimulainya pemerintahan Indonesia yang Demokrasi. Pembelajaran sejarah berubah secara keseluruhan, mulai dari tujuan, landasan, hingga buku-buku sejarah masa Orde Baru banyak dikritisi oleh sejarawan Reformasi. Perbandingan pembelajaran sejarah mulai dari posisi, materi hingga tujuan dari masa Orde Lama sampai Reformasi, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1: Pembelajaran Sejarah Masa Orde Lama

Indikator	Kurikulum 1947	Kurikulum 1952	Kurikulum 1964
1. Posisi	Pada masa ini yang lebih ditekankan adalah pendidikan kesenian dan jasmani, yang bisa	Mata pelajaran sejarah masuk dalam kelompok Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) bersama	• Mata pelajaran hanya diklasifikasikan dalam lima kelompok bidang

	menumbuhkan kesadaran bela negara.	dengan ilmu bumi.	studi: moral, inteligensi, emosional atau artistik keterampilan, dan jasmaniah. • Oleh karena itu, mata pelajaran sejarah masuk dalam kategori inteligensi (pengetahuan).
2. Materi	Materi pelajaran dihubungkan dengan kejadian dan kehidupan sehari-hari serta memberikan perhatian terhadap pendidikan kesenian dan pendidikan jasmani.	Membahas sejarah tentang ke Indonesiaan yang bisa membangun semangat nasionalisme siswa	• Sesuai dengan indoktrinasi pendidikan nasional oleh pemerintahan Soekarno guna mendukung kebijakan politik dalam negeri maupun luar negeri. • Materi-materi indoktrinasi dikumpulkan dari berbagai naskah pidato presiden Soekarno yang juga selaras dengan Manipol/USDEK
2. Tujuan	Penanaman sikap dan semangat patriotisme yang bertujuan untuk mengobarkan semangat kemerdekaan dan semangat juang generasi muda agar muncul keberanian dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia.	• Mewujudkan rasa nasionalisme generasi muda terhadap bangsa dan negara Indonesia. • Membalikkan situasi dan kondisi masyarakat yang dibodohkan dengan pengajaran Eropa-sentris, pro-kolonialisme menjadi masyarakat yang kenal dan bangga akan budaya Indonesia.	Membentuk manusia Pancasila dan Manipol/USDEK yang bertanggung jawab atas terselenggaranya masyarakat adil dan makmur, materiil dan spiritual

Tabel 2: Pembelajaran Sejarah Masa Orde Baru

Indikator	Kurikulum 1968	Kurikulum 1975	Kurikulum 1984	Kurikulum 1994
1. Posisi	Bergabung dengan pendidikan kewarganegaraan	Ilmu bumi dan sejarah digabung dan dikenal dengan IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial).	<ul style="list-style-type: none"> • Mata pelajaran sejarah terbagi dalam dua bagian: Sejarah Nasional Indonesia dan Sejarah Dunia • Mata pelajaran PSPB (pendidikan sejarah perjuangan bangsa) 	<ul style="list-style-type: none"> • Berubah nama menjadi Sejarah Nasional dan Sejarah Umum • Mata pelajaran PSPB dihapuskan
2. Materi	anti komunisme, anti Soekarno, anti Demokrasi Liberal dan anti Demokrasi Terpimpin.	Terkait dengan pembinaan moral Pancasila	<ul style="list-style-type: none"> • Lebih menekankan konsep dan keterkaitan antara satu peristiwa sejarah dengan peristiwa lainnya • Seputar perjuangan bangsa mulai dari proklamasi hingga era pengisian kemerdekaan 	Difokuskan pada perjalanan hidup masyarakat masa lampau hingga sekarang, nasional maupun dunia
3. Tujuan	Memperkuat legitimasi kekuasaan dan menunjukkan keberhasilan orde baru	Agar peserta didik memiliki karakter dan siap dalam menghadapi tantangan global	<ul style="list-style-type: none"> • Memperoleh pengalaman belajar secara maksimal, baik dari ranah kognitif, afektif, dan 	Memahami pengetahuan tentang sejarah sehingga dapat menumbuh-

			psikomotorik • Tujuan PSPB untuk menanamkan nilai-nilai rela berkorban, persatuan, kerjasama, saling menghargai dan bangga terhadap tanah air.	kembangkan jati diri bangsa dan wawasan antar bangsa.
--	--	--	---	---

Tabel 3: Pembelajaran Sejarah Masa Reformasi

Indikator	Kurikulum 2004	Kurikulum 2006	Kurikulum 2013
1. Posisi	Pembelajaran sejarah berdiri sendiri	<ul style="list-style-type: none"> • SMP: masuk dalam kategori IPS bersama dengan mata pelajaran sosiologi, geografi, dan ekonomi. • SMA: mata pelajaran sejarah berdiri sendiri yang sama dengan mata pelajaran lain. 	<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki posisi terhormat dibanding kurikulum sebelumnya, terbukti jam pelajaran sejarah lebih banyak dibanding mata pelajaran lain. Sejarah untuk SMA terbagi dua, yakni sejarah sebagai mata pelajaran wajib, dan sejarah sebagai mata pelajaran pemintan.
2. Materi	<p>Seputar peristiwa sejarah.</p> <p>Dalam kurikulum 2004, buku-buku sejarah dilarang terbit karena SKKD tidak banyak mencatat fakta perjalanan bangsa Indonesia</p>	Masalah-masalah sosial kontemporer yang sedang dihadapi oleh para peserta didik atau bisa disimpulkan materi sejarah dalam kurikulum KTSP berfokus pada sejarah lokal yang relevan dengan persoalan setempat	<p>Berbicara berbagai macam peristiwa.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sejarah wajib: berbicara seputar sejarah ke-Indonesian. • Sejarah peminatan: berbicara mengenai sejarah sebagai ilmu, peristiwa sejarah dunia dan kaitannya dengan Indonesia
3. Tujuan	Menekankan pada ketercapaian	Tujuan yang ingin dicapai sesuai	Menekankan pada pengenalan peserta

	kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal	dengan pendidikan nasional serta kesesuaian dengan kondisi dan potensi daerah satuan pendidikan dan peserta didik.	didik terhadap lingkungan sekitarnya dengan harapan peserta didik tidak tercerabut dari akar budayanya.
--	---	--	---

PEMBAHASAN

a. Arti Penting Belajar Sejarah

Peristiwa yang terjadi pada masa lalu, khususnya yang memiliki makna dan merupakan momen yang tidak akan pernah terlupakan. Momen tersebut mempunyai hikmah dan pelajaran yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Salah satu kutipan yang paling terkenal mengenai sejarah dan pentingnya belajar sejarah ditulis oleh filsuf Spanyol, George Santayana, yaitu *"mereka yang tidak mengenal masa lalunya, dikutuk untuk mengulangnya"* [4]. Alasan lain dalam mempelajari sejarah adalah rasa ingin tahu mengenai masa lampau, baik mengenai keluarga, tempat tinggal, asal-usul budaya dan sebagainya. Dengan demikian, belajar sejarah merupakan pencarian untuk menemukan pelajaran-pelajaran sejarah yang akan membantu manusia masa sekarang untuk memecahkan masalahnya.

Lebih lanjut, pembelajaran sejarah adalah suatu proses untuk membantu mengembangkan potensi dan kepribadian peserta didik melalui pesan-pesan sejarah agar menjadi warga bangsa yang arif dan bermartabat [5]. Manusia akan bingung jika tidak tahu akan sejarahnya tetapi akan maju dan berkembang apabila melihat ke belakang. Dalam filsafat sejarah, dinamakan historisme. Historisme adalah berpikir dengan melihat bahwa peristiwa yang terjadi pada masa lalu mengandung

pelajaran yang begitu besar bagi kehidupan yang akan datang sehingga muncul semangat untuk lebih baik dari sebelumnya [6].

Selain itu, dalam pelajaran sejarah perlu dimasukkan biografi pahlawan mencakup soal kepribadian, perwatakan, semangat berkorban, (*historical-mindedness*), perbedaan antara sejarah dan mitos, legenda, dan novel histories [7]. Ini bertujuan agar generasi muda tidak kehilangan identitas bangsa yang memiliki nilai-nilai luhur dan bermartabat. Nilai-nilai kebangsaan dan fondasi nilai budaya yang luhur dapat dicapai dengan belajar sejarah. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa sejarah merupakan cabang ilmu pengetahuan yang mengkaji secara sistematis keseluruhan perkembangan, proses perubahan kehidupan masyarakat yang terjadi di masa lampau dengan tujuan mewariskan nilai-nilai kebajikan kepada generasi yang mempelajarinya.

b. Perkembangan Pembelajaran Sejarah

Pembelajaran sejarah merupakan mata pelajaran yang sangat strategis dalam melegalkan sebuah kekuasaan. Seiring dengan perjalanan bangsa Indonesia yang jatuh bangun dalam mempertahankan kemerdekaan, mata pelajaran sejarah juga berbeda tujuan dari satu periode kekuasaan dengan periode kekuasaan lainnya. Perbedaan tujuan dan sasaran tersebut disesuaikan dengan tujuan dan arah kebijakan penguasa.

1) Pembelajaran Sejarah Pada Masa Orde Lama

Pasca kemerdekaan arah pendidikan Indonesia mengalami perubahan. Sistem pendidikan sebelumnya hanya berorientasi pada kepentingan penjajah atau bersifat Eropa sentris. Setelah kemerdekaan, orientasi pendidikan berubah baik dari sisi filosofis, bentuk maupun tujuan pendidikan itu sendiri. Tujuan pendidikan pasca kemerdekaan

secara umum yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa yang berorientasi pada penanaman nasionalisme rakyat terhadap bangsanya. Penanaman nasionalis disebabkan karena situasi dan kondisi negara masih mengalami perjuangan fisik dalam mempertahankan kemerdekaan karena Belanda masih berusaha untuk kembali menjajah Indonesia.

Lebih lanjut, rumusan tujuan pendidikan tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (pembukaan Alinea ke IV), yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan pendidikan nasional Indonesia juga terealisasi dalam UU No. 4 Tahun 1950 yaitu membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air. Oleh karena itu, kurikulum Rencana Pelajaran 1947 sering juga disebut kurikulum 1950 [8]. Kebijakan tersebut menempatkan posisi mata pelajaran sejarah berada pada posisi terhormat karena diharapkan mampu membalikkan situasi dan kondisi masyarakat dari sistem feodal menjadi warga negara yang demokratis [9].

Pembelajaran sejarah juga diharapkan mampu mencerdaskan dan dapat mewujudkan nasionalisme generasi muda terhadap bangsa Indonesia, sehingga pada masa ini dibentuklah tim sejarah Indonesia yang diketuai oleh Prijono dengan keanggotaan sejarawan UI dan sejarawan Belanda yang bekerja di UI dan Dinas Kepurbakalaan. Pembentukan kepanitiaan ini dilatarbelakangi oleh adanya pandangan terhadap pelajaran sejarah Indonesia sebagai wahana yang strategis dalam rangka membentuk watak, karakter dan kepribadian warga negara kearah yang lebih baik melalui pengajaran sejarah [10].

Dekade pemerintahan Soekarno selanjutnya yang ditandai dengan dekrit Presiden 5 Juli 1959, mengawali proses politisasi pendidikan terutama sejarah Indonesia. Pada masa ini dikenal dengan era indoktrinasi pendidikan nasional oleh Soekarno guna mendukung kebijakan politik dalam negeri maupun luar negeri [11]. Materi-materi indoktrinasi dikumpulkan dari berbagai naskah pidato presiden Soekarno dalam berbagai kesempatan. Guna memperkuat indoktrinasi, TAP MPRS No II/MPRS/1960 menetapkan Pancasila dan Manipol sebagai mata pelajaran wajib dari sekolah tingkat rendah sampai perguruan tinggi. Selanjutnya presiden juga menerbitkan Kepres tanggal 28 Mei No.145/1965 yang bertujuan agar pendidikan nasional sebagai alat revolusi, menentang paham imperialisme, kolonialisme/neokolonialisme, feodalisme dan kapitalisme [12].

Pada tahun 1964, tujuan pendidikan ialah membentuk manusia Pancasila dan Manipol/Usdek yang bertanggung jawab atas terselenggaranya masyarakat adil dan makmur, materiil dan spritual. Sistem pendidikan masa ini sering disebut dengan sistem panca wardana atau sistem 5 aspek perkembangan: a) perkembangan moral, b) perkembangan inteligensi, c) perkembangan emosional artistik (rasa keharuan), d), perkembangan keprigelan, dan e), perkembangan jasmaniah. Materi pembelajaran tidak terkecuali sejarah pada masa ini sering diambil dari pidato presiden Soekarno (indoktrinasi) yang mengarahkan sistem pendidikan nasional agar membentuk tenaga ahli dalam pembangunan yang sesuai dengan syarat-syarat masyarakat sosialis Indonesia.

2). Pembelajaran Sejarah Pada Masa Orde Baru

Pemerintahan Orde Baru dimulai sejak tahun 1966 – 1998, dengan adanya Surat Perintah Sebelas Maret, yang kemudian diartikan sebagai surat pemindahan kekuasaan. Berdasarkan Ketetapan MPRS No. XXVII/MPRS/1966 tujuan pendidikan pada masa Orde Baru secara umum untuk membantu manusia yang berjiwa Pancasila, cerdas, terampil dan berbudi pekerti luhur serta berkepribadian Indonesia yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembangunan [13]. Tujuan ini terealisasi dalam kurikulum pendidikan yang berganti empat kali, mulai dari kurikulum 1968, 1975, 1984, 1994.

Pertama kurikulum 1968, pendidikan diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan, serta mengembangkan fisik yang sehat dan kuat. Kelahiran Kurikulum 1968 bersifat politis: mengganti Rencana Pendidikan 1964 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama, dengan tujuannya pada pembentukan manusia Pancasila sejati [14]. Posisi mata pelajaran sejarah dalam kurikulum 1968 dimasukkan dalam materi kurikulum pendidikan kewarganegaraan. Ruang lingkup dan isi materi pelajaran sejarah bagian terpenting dalam pemerintahan orde baru sebab, sebagai legitimasi kekuasaan dan menunjukkan keberhasilan orde baru di bawah pemerintahan Soeharto [15].

Secara umum kurikulum 1968 berisi materi tentang anti komunisme, anti Soekarno, anti Demokrasi Liberal, dan anti terhadap demokrasi Terpimpin. Disamping itu, buku-buku yang diterbitkan harus berstandar SNI dan pro terhadap perjuangan Soeharto dalam menyelamatkan bangsa Indonesia dari disintegrasi sosial dan disintegrasi bangsa. Kedua kurikulum 1975 adalah kurikulum di Indonesia yang dikembangkan

berdasarkan proses dan prosedur pada teori pengembangan kurikulum. Dalam kurikulum 1975, ilmu bumi dan sejarah digabung dan dikenal dengan IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial). Ciri khusus dari kurikulum 1975 yakni menganut pendekatan yang berorientasi kepada tujuan sehingga menuntut guru harus kompeten, menganut pendekatan integratif, menekankan peserta didik agar memiliki moral yang sesuai dengan Pancasila.

Pembinaan moral Pancasila peserta didik dibebankan juga pada pelajaran ilmu sosial terutama sejarah yang banyak memiliki nilai-nilai moral dalam setiap peristiwa maupun keteladanan tokoh. Tugas-tugas yang diberikan guru kebanyakan bersifat portofolio sehingga kreativitas siswa sangat menentukan. Ketiga kurikulum 1984, mengusung *proses skill approach* [16]. Kurikulum ini juga sering disebut sebagai “kurikulum 1975 yang disempurnakan”. Posisi mata pelajaran sejarah pada kurikulum ini tidak jauh berbeda dengan kurikulum sebelumnya. Sebelum pemberlakuan kurikulum 1984, yaitu pada tahun 1983 mata pelajaran Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB) ditetapkan sebagai mata pelajaran wajib.

Penetapan ini berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0461/U/1983 yang ditandatangani Prof. Dr. Nugroho Notosusanto. Kedudukan PSPB sebagai materi dan mata kuliah wajib dalam kurikulum mendapat kedudukan hukum yang lebih kuat ketika MPR mengeluarkan TAP MPR Nomor II/MPR/1983 dimana dinyatakan PSPB sebagai bagian dari Pendidikan Pancasila. Dengan demikian maka pendidikan ideologi dilakukan melalui Pendidikan Pancasila yang memiliki komponen Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-

4), Pendidikan Moral Pancasila (PMP), dan Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB).

Mata pelajaran sejarah dalam kurikulum 1984 disebut sejarah nasional Indonesia dan sejarah dunia. Mata pelajaran ini diberikan untuk semua program dan termasuk pada pelajaran inti dengan jumlah beban belajar sama yaitu 14 kredit [17]. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, mata pelajaran sejarah dengan lebih menekankan pemahaman konsep sehingga peserta didik memiliki kemampuan terhadap inti-inti materi untuk memudahkan dalam menghubungkan satu peristiwa sejarah dengan peristiwa lainnya. Sementara itu mata pelajaran PSPB (Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa) lebih menekankan perjuangan bangsa Indonesia dalam kurun waktu proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 hingga era pengisian kemerdekaan yang dibagi dalam tiga kelas, dengan bahan ajar sebagai berikut:

- a) kelas I: Seputar penjajahan belanda sampai pembentukan kementerian negara
- b) kelas II: seputar perndingan antara Indonesia-Belanda sampai dengan aksi-aksi sepihak PKI yang bertentangan dengan nilai UUD 1945.
- c) kelas III: seputar persatuan Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) sampai dengan pembangunan Nasional berencana sebagai upaya mengisi kemerdekaan.

Keempat kurikulum 1994 dibuat sebagai penyempurnaan kurikulum 1984 dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Hal ini berdampak pada sistem pembagian waktu pelajaran, yaitu dengan mengubah dari sistem semester ke sistem caturwulan. Perubahan lainnya yakni penghapusan mata

pelajaran Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB). Selain itu, muatan materi yang berkenaan dengan masalah sosial maupun sejarah semakin berkurang sedangkan materi pada IPA dan matematika semakin bertambah [18]. Kurikulum 1994 memberikan ruang pelajaran Sejarah untuk menumbuhkan rasa bangga dan cinta tanah air. Oleh karena itu materi difokuskan pada perjalanan hidup masyarakat masa lampau hingga sekarang, nasional maupun dunia. Mata pelajaran sejarah nasional dan sejarah umum ini berfungsi sebagai sarana untuk memahami pengetahuan tentang sejarah sehingga dapat menumbuh-kembangkan jati diri bangsa dan wawasan antar bangsa.

3). Pembelajaran Sejarah Pada Masa Reformasi

Pasca lengsernya Soeharto dari tahta Presiden, pemerintah hanya fokus pada masalah pemerintahan saja. Artinya pemecahan masalah politik dan ekonomi yang paling diperhatikan oleh pemerintah, dan menyebabkan sektor lain seperti pendidikan kurang mendapat perhatian yang serius pada masa awal Reformasi [19]. Perubahan politik dari Orde Baru menjadi Reformasi banyak mengubah tatanan negara Indonesia, misalnya dalam pendidikan khususnya materi pembelajaran sejarah. Buku-buku sejarah yang diterbitkan masa orde baru banyak “dicurigai” oleh kalangan akademisi Reformasi sebagai karya “pesanan” dan pembenaran politik Soeharto. Walaupun tidak semua karya sejarah sebagai “justifikasi” politik atau terkontaminasi pembenaran rezim orde baru, tetapi penulisan sejarah yang cenderung “seragam” membuat akademisi curiga dengan karya-karya sejarah yang terbit masa orde baru. Oleh karena itu, sejarawan masa Reformasi menerbitkan IDAS (Indonesia Dalam Arus Sejarah) untuk referensi yang lebih beragam dari SNI (Sejarah Nasional Indonesia) [20].

Perubahan arah dan penulisan sejarah masa Reformasi juga mempengaruhi materi sejarah dalam kurikulum yang dikembangkan kepada peserta didik. Kurikulum 2004 sebagai kurikulum pertama yang dicetuskan masa Reformasi juga dikenal sebagai Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Kurikulum ini diterapkan bukan sebagai upaya dalam memperbaiki kurikulum sebelumnya, tetapi disebabkan oleh situasi dan kebutuhan masyarakat yang menuntut tersedianya SDM yang unggul dan kompeten. Selama pelaksanaan uji coba kurikulum 2004, buku-buku sejarah yang mengacu pada kurikulum tersebut dilarang oleh pemerintah melalui arahan menteri Pendidikan nasional Bambang Sudibyo. Pelarangan tersebut dinilai karena Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar pada mata pelajaran sejarah dalam kurikulum 2004 tidak sepenuhnya mencatat fakta perjalanan bangsa Indonesia [21].

Kurikulum 2004 akhirnya diganti dengan kurikulum 2006 yang dikenal dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Hal ini dipicu agar peserta didik lebih mandiri dengan cara memberdayakan satuan pendidikan melalui otonomi daerah kepada lembaga pendidikan. Dalam kurikulum KTSP, guru sejarah dan atau IPS di sekolah diberikan otonomi yang luas untuk mengembangkan materi pembelajaran yang sesuai dengan situasi daerah setempat. Masalah-masalah sosial kontemporer yang sedang dihadapi oleh para peserta didik dapat diangkat sebagai materi pembelajaran sejarah sebagai pengembangan dari materi dalam dokumen kurikulum (Peraturan Menteri Diknas No 22,23 dan 24 Tahun 2006).

Dengan demikian, pembelajaran sejarah dalam kurikulum KTSP berfokus pada sejarah lokal yang relevan dengan persoalan setempat.

Selain itu, sejarah dalam KTSP juga harus menampilkan peran orang-orang biasa termasuk para peserta didik dengan persoalan sosialnya sebagai pelaku sejarah pada zamannya. Untuk SMP, pembelajaran sejarah masuk dalam kategori IPS bersama dengan mata pelajaran sosiologi, geografi, dan ekonomi. Sementara untuk jenjang pendidikan SMA, sejarah hanya diberikan 2 (dua) jam mata pelajaran tiap minggu untuk peserta didik yang mengambil jurusan IPA dan 4 (empat) jam tiap minggu untuk peserta didik yang mengambil jurusan IPS. Kurikulum KTSP akhirnya diganti dengan kurikulum 2013 (K-13) dengan alasan materi yang diajarkan kepada peserta didik terlalu banyak dan padat. Selain itu, keleluasaan terhadap guru membuat kurikulum secara mandiri untuk masing-masing sekolah ternyata tak berjalan mulus.

Kurikulum 2013 sebagai lanjutan kurikulum KBK dan KTSP mulai diberlakukan sejak tahun ajaran 2013/2014. Kurikulum ini bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, inovatif, efektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan peradaban dunia [22]. Posisi mata pelajaran sejarah dalam kurikulum 2013 di tingkat SMA baik untuk kelas wajib maupun peminatan mengalami perubahan dari kurikulum sebelumnya. Dalam kurikulum 2013, posisi pembelajaran sejarah memiliki tempat terhormat karena sesuai dengan landasan pengembangan kurikulum. Pembelajaran sejarah dinilai sebagai salah satu mata pelajaran yang berperan penting dalam pengembangan karakter peserta didik, sehingga memiliki jumlah jam mata pelajaran yang banyak. Bagi peserta didik yang mengambil jurusan IPA, akan memperoleh 2 (dua) jam mata pelajaran

sejarah tiap minggu dengan materi perjuangan bangsa Indonesia. Sementara bagi peserta didik yang mengambil jurusan IPS kelas X akan memperoleh 3 (jam) mata pelajaran sejarah tiap minggu, sedangkan kelas XI dan XII memperoleh 4 (empat) jam mata pelajaran sejarah tiap minggunya.

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa dalam kurikulum 2013 khususnya mata pelajaran sejarah Indonesia lebih menekankan pada pengenalan peserta didik terhadap lingkungan sekitarnya dengan harapan peserta didik tidak tercerabut dari akar budayanya. Karakteristik materi pelajaran sejarah Indonesia pada jenjang pendidikan SMA/MA dalam kurikulum 2013 berbicara berbagai macam peristiwa. Oleh karena itu, pedoman pembelajaran sejarah Indonesia berkenaan dengan cara penggunaan buku teks pelajaran dan buku guru, mengaitkan konten sejarah nasional dengan sejarah lokal serta sejarah dunia dalam suatu proses pembelajaran yang inovatif dan didasarkan pada pendekatan saintifik.

KESIMPULAN

Sejak kemerdekaan Indonesia 1945, kurikulum pendidikan sudah berubah sebanyak 9 (sembilan) kali. Tentunya perubahan kurikulum tersebut juga berdampak pada pembelajaran sejarah. Masa Orde Lama, dibawah kepemimpinan Soekarno pembelajaran sejarah dituntut untuk bisa memberikan semangat motivasi bagi generasi muda, agar mau berjuang melawan penjajah, mengingat situasi dan kondisi pada masa ini, Indonesia masih harus mempertahankan kemerdekaannya. Beralih ke tahun 1950-1960-an, corak kepemimpinan Soekarno ditandai dengan ciri

Manipol/USDEK (Manifesto politik/Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin).

Orde Baru juga mempunyai warna tersendiri dalam pemerintahannya, sehingga pembelajaran sejarah masa ini melakukan perubahan mainset generasi muda agar tidak terpengaruh terhadap ideologi pengajaran Manipol USDEK. Pembelajaran sejarah juga digunakan untuk memperkuat legitimisasi kekuasaan dan menunjukkan keberhasilan Orde Baru. Sejak Refomasi yang dimulai tahun 1999, pembelajaran sejarah berubah secara keseluruhan, mulai dari tujuan, landasan, hingga buku-buku sejarah masa Orde Baru banyak dikritisi oleh sejarawan Reformasi.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Zulkarnain. (2017). "Kebijakan kurikulum sejarah di sekolah menengah atas". Disertasi. Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta.
- [2] Suharto, Toto. (2012). Implikasi kebijakan pendidikan Era Soeharto pada eksistensi Madrasah. *Media pendidikan jurnal pendidikan Islam* 27(3): 365-382
- [3] Lasa, HS. (2009). *Kamus kepustakawan Indonesia*. Yogyakarta. Pustaka Book Publisier. Hlm 207
- [4] Kuntowijoyo. (2008). *Penjelasan sejarah*. Yogyakarta : Tiara Wacana. Hlm: 12
- [5] Sardiman, AM. (2012). *Pembelajaran Sejarah Dan Nilai-Nilai Kepahlawanan*. Fakultas Ilmu Sosial-Universitas Negeri Yogyakarta. Hlm: 6
- [6] Sulasman. (2014). *Metodologi penelitian sejarah*. Bandung : Pustaka Setia. Hlm: 30

- [7] Aman. (2014). "Aktualisasi Nilai-Nilai Kesadaran Sejarah Dan Nasionalisme Dalam Pembelajaran Sejarah Di SMA". *Jurnal Pendidikan Karakter*, Tahun IV, Nomor 1, Februari 2014.
- [8] Wahyuni, Fitri. (2015). Kurikulum dari masa ke masa (231-242). *Al-Adabiya* 10(2). Hal: 15
- [9] Abdullah Idi. 2016. *Pengembangan Kurikulum Teori & Praktek*. Jogjakarta : Ar-Ruzz Media. Hlm: 39
- [10] Zulkarnain. (2017). "Kebijakan kurikulum sejarah di sekolah menengah atas". Disertasi. Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta. Hlm: 19
- [11] Gunawan, Ari H. (1986). *Kebijakan-kebijakan pendidikan di Indonesia*. Jakarta : Bina Aksara. Hlm: 49
- [12] Zulkarnain. (2017). "Kebijakan kurikulum sejarah di sekolah menengah atas". Disertasi. Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta. Hlm: 19
- [13] Hasbullah. (1985). *Sejarah pendidikan Islam di indonesia: lintasan sejarah pertumbuhan dan perkembangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hlm: 82.
- [14] Tilaar, H.A.R. (1995). *50 Tahun Pembangunan Pendidikan Nasional 1945-1995*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia. Hlm: 78
- [15] Zulkarnain. (2017). "Kebijakan kurikulum sejarah di sekolah menengah atas". Disertasi. Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta. Hlm: 21
- [16] Alhamuddin. (2014). Sejarah kurikulum di Indonesia (studi analisis kebijakan pengembangan kurikulum). *Nur El-Islam*, Volume 1, Nomor 2, Oktober 2014.
- [17] Zulkarnain. (2017). "Kebijakan kurikulum sejarah di sekolah menengah atas". Disertasi. Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta. Hlm: 24

- [18] Hasan, Hamid. Perkembangan kurikulum: perkembangan ideologis dan perkembangan teoritik pedagogik (1950-2005). Pendidikan Sejarah, Universitas Pendidikan Indonesia
- [19] Sirozi, M. (2010). *Politik pendidikan, dinamika hubungan antara kepentingan kekuasaan dan praktek penyelenggaraan pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm: 25
- [20] Krisnawan, Yohanes. "Jejak baru dalam penulisan sejarah". <http://wartakota.tribunnews.com/2014/05/18/jejak-baru-dalam-penulisan-sejarah>. Editor: Andy Pribadi. Diakses pada 02 Desember 2018 pukul 13.00 WIB.
- [21] Kantor berita politik RMOL.co. "Wawancara Bambang Sudibyo: Ubah kurikulum Pendidikan Bukan barang gampang". Kamis 27 Desember 2012. Diakes pada 03 Desember 2018 pukul 20.00 WIB.
- [22] Kurniaman, Otang & Noviana, Eddy. (2017). Penerapan kurikulum 2013 dalam meningkatkan keterampilan, sikap, dan pengetahuan. *Jurnal Primary Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau*. 6 (2): 389-396.